



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

No.11,2015

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.  
Tatacara, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring, evaluasi, belanja, hibah.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN,  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian hibah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi belanja hibah;

- c. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan akuntabilitas pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 36.1), sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tatacara Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bantul selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. SKPD Teknis adalah SKPD selaku koordinator yang membantu Bupati melakukan proses pemberian belanja hibah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan urusan pemerintahan daerah.
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Rencana kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. Proposal adalah permohonan hibah yang ditujukan kepada Bupati yang memuat maksud dan tujuan serta rencana anggaran belanja.
22. Transfer adalah pemindahbukuan dari rekening Pemerintah Daerah kepada rekening penerima hibah.
23. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD.

#### Pasal 3

Pemberian hibah bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

#### Pasal 4

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.

## BAB II KRITERIA DAN PEMBERIAN HIBAH

### Bagian Kesatu Kriteria Hibah

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

#### Pasal 6

Pemberian hibah oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Bagian Kedua  
Pemberian Hibah

Pasal 7

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. perusahaan daerah;
- c. masyarakat; dan/atau
- d. organisasi kemasyarakatan;

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, termasuk infrastruktur masyarakat/lingkungan dan keolahragaan nonprofesional.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Termasuk dalam kriteria organisasi kemasyarakatan antara lain kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI), Pramuka dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Pasal 9

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
  - a. Telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten paling sedikit 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap dan alamat yang jelas.

### BAB III PENGANGGARAN

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD teknis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum rancangan KUA dan PPAS sebelum diserahkan ke DPRD.
- (2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. usulan hibah yang ditandatangani oleh pimpinan pemohon;
  - b. surat pernyataan kesanggupan menandatangani NPHD dan Pakta Integritas; dan
  - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan pemohon hibah;

#### Pasal 11

- (1) SKPD teknis melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Evaluasi usulan hibah yang dilakukan SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2); dan
  - b. kegiatan yang akan didanai dari belanja hibah sesuai dengan tujuan pemberian hibah guna menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan setiap tahun anggaran yang direncanakan.

#### Pasal 12

- (1) Kepala SKPD teknis menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rancangan KUA dan PPAS diserahkan ke DPRD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD dan memuat pertimbangan besaran pemberian hibah.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD Teknis dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

#### Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemerintah;
  - b. Perusahaan Daerah;
  - c. Masyarakat; dan
  - d. Organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

#### Pasal 16

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

### BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

#### Pasal 18

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan NPHD hibah berupa uang kepada Kepala SKPD Teknis atau pejabat lain dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Penandatanganan NPHD hibah berupa barang/jasa didelegasikan kepada SKPD Teknis pengguna barang sesuai DPA-SKPD.
- (3) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD Teknis atau pejabat lain dan penerima hibah.

- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
  - f. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban hibah; dan
  - g. sanksi.
- (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) SKPD Teknis mengajukan permohonan pencairan hibah berupa uang kepada Bupati melalui PPKD dengan dilampiri :
  - a. Fotocopy NPHD;
  - b. bukti pengeluaran kas;
  - c. kwintansi;
  - d. pakta integritas;
  - e. Keputusan Bupati penetapan daftar penerima hibah; dan
  - f. Foto copy rekening bank penerima hibah.
- (6) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (7) Format Keputusan Bupati, permohonan pencairan hibah, pakta integritas, blangko bukti pengeluaran kas dan blangko kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah barang atau jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang atau jasa yang akan dihibahkan sebelum diserahkan kepada penerima hibah, oleh SKPD teknis dicatat sebagai barang persediaan.
- (3) SKPD teknis melaksanakan pengelolaan hibah barang dan jasa dengan kelengkapan dokumen berupa :
  - a. Keputusan Bupati penetapan daftar penerima hibah;
  - b. NPHD;

- c. Surat perintah pengeluaran barang persediaan dari Kepala SKPD kepada penyimpan barang; dan
  - d. Berita Acara Serah Terima Barang atau Jasa dari Kepala SKPD kepada penerima hibah
- (4) Format berita acara serah terima barang atau jasa sebagaimana pada ayat (3) huruf d tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 21

- a. Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD Teknis untuk diteruskan kepada PPKD, dan 1 (satu) salinan disimpan oleh SKPD Teknis; dan
- b. Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD Teknis dengan tembusan DPPKAD.

### Pasal 22

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD Teknis.

### Pasal 23

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. Usulan dari calon penerima hibah;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas; dan
- e. bukti transfer uang/berita acara serah terima uang apabila pemberian hibah berupa uang, atau bukti serah terima barang/jasa apabila pemberian hibah berupa barang/jasa.

### Pasal 24

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
  - a. pelaporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang, atau salinan bukti serah terima barang dan/atau jasa bagi penerima hibah berupa barang dan/atau jasa.
- (3) Penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.

- (4) Pencairan hibah yang dilakukan secara bertahap, penerima hibah harus menyampaikan laporan penggunaan hibah tahap sebelumnya kepada Bupati melalui SKPD Teknis untuk diteruskan kepada PPKD, dan 1 (satu) salinan disimpan oleh SKPD Teknis.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (6) SKPD Teknis mendampingi aparat pemeriksa untuk keperluan pemeriksaan yang berhubungan dengan penerima hibah.

#### Pasal 25

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 26

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

### BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 27

- (1) SKPD Teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pengelolaan hibah tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri, maka pengaturan pengelolaannya dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 36.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 05 MARET 2015

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul  
pada Tanggal 05 MARET 2015

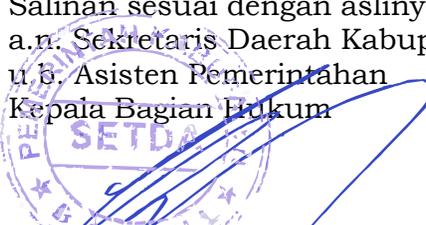
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 11 TAHUN 2015  
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN  
 DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN  
 PERTANGGUNG JAWABAN, SERTA MONITORING DAN  
 EVALUASI BELANJA HIBAH

CONTOH FORMAT REKOMENDASI SKPD

REKOMENDASI USULAN HIBAH UANG/BARANG  
 APBD KAB. BANTUL TAHUN.....

SKPD :

NO	CALON PENERIMA	ALAMAT	KEGIATAN	USULAN (Rp)/BARANG	REKOMENDASI HIBAH	
					Rp	BARANG

Bantul,  
Kepala SKPD

.....  
NIP.....

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 11 TAHUN 2015  
 TENTANG TATA CARA  
 PENGANGGARAN, PELAKSANAAN  
 DAN PENATAUSAHAAN,  
 PELAPORAN DAN PERTANGGUNG  
 JAWABAN, SERTA MONITORING  
 DAN EVALUASI BELANJA HIBAH

CONTOH FORMAT NPHD

PERJANJIAN HIBAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN

..... (*penerima hibah*)

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA ..... (*penerima hibah*)

---

Nomor : .....

Nomor :

**Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul kami yang bertandatangan di bawah ini :**

1. Nama : .....  
 Jabatan : Kepala .....

dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... yang berkedudukan di ....., Jalan ....., yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : .....  
 Jabatan : .....

dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama ..... (*lembaga penerima hibah*), berkedudukan di..... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah setuju dan sepakat mengadakan perjanjian dalam rangka pemberian hibah kepada .....(*lembaga penerima hibah*) dengan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini :

**BAB I**  
DASAR HUKUM PERJANJIAN

**Pasal 1**

**Dasar hukum pelaksanaan perjanjian hibah ini adalah :**

1. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;**
2. **Peraturan Bupati Bantul Nomor ..... Tahun 2015 tentang .....**
3. **Keputusan Bupati Bantul ..... Tahun ..... tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah.....**
4. **Keputusan Bupati Bantul ..... Tahun ..... tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.....**
5. **..... *dst seperlunya.***

**BAB II**  
MAKSUD DAN TUJUAN

**Pasal 2**

- (1) Pemberian hibah dimaksudkan untuk ..... (*sesuaikan dengan maksud hibah*)
- (2) Tujuan Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ..... (*sesuaikan dengan tujuan hibah*).

**BAB III**  
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

**Pasal 3**

Ruang lingkup perjanjian hibah ini adalah pemberian hibah untuk ..... kepada ..... sebesar Rp.....,- (.....).

**Pasal 4**

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disalurkan kepada ..... untuk dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
PENERIMAAN HIBAH

**Pasal 5**

Penerimaan Hibah bersifat sebagai bantuan yang tidak mengikat dan harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam perjanjian hibah ini.

BAB V  
ALOKASI PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan untuk .....
- (2) Pengelolaan, pelaksanaan, dan penatausahaan hibah dana ..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 7

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban memberikan hibah kepada ..... untuk ..... sebesar Rp. ....,- (.....).
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
  - a. menggunakan hibah ..... sesuai dengan alokasi dan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. melaporkan kepada Bupati Bantul melalui ..... (*SKPD Teknis*) dalam hal penggunaan hibah.

Pasal 8

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
  - a. menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah ..... dari PIHAK KEDUA;
  - b. menerima laporan pelaksanaan kegiatan/kemajuan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan hibah ..... dari PIHAK KEDUA; dan
  - c. mengadakan koordinasi, monitoring/pengawasan terhadap PIHAK KEDUA dalam rangka pengelolaan hibah .....
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
  - a. menerima hibah ..... sebesar Rp.....,- (.....); dan
  - b. menggunakan hibah ..... sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan hibah ..... sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA selaku penerima hibah.
- (2) Pelaporan pengelolaan dana hibah ..... sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA melaporkan pemanfaatan dana hibah ..... kepada PIHAK KESATU.

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi, monitoring/pengawasan terhadap pengelolaan hibah ..... dan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan hibah dimaksud.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi, monitoring/pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh PIHAK KESATU dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini, hanya dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan musyawarah mufakat dan kemudian mencantumkannya dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Segala biaya yang timbul untuk pembuatan perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 12

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam perjanjian hibah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**

*Cap ttd*

.....

**PIHAK KESATU,**

*Cap ttd.*

.....(*nama, NIP*).....

**NB :** *materi perjanjian disesuaikan dengan jenis hibah.*

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 11 TAHUN 2015  
 TENTANG TATA CARA  
 PENGANGGARAN, PELAKSANAAN  
 DAN PENATAUSAHAAN,  
 PELAPORAN DAN PERTANGGUNG  
 JAWABAN, SERTA MONITORING  
 DAN EVALUASI BELANJA HIBAH  
 CONTOH KEPUTUSAN BUPATI



**BUPATI BANTUL**

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR .....TAHUN .....  
 TENTANG  
 DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH  
 .....  
 BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa belanja bantuan hibah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran.....yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima Hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian Hibah;
  - b. bahwa belanja Hibah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran.....sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Daftar Penerima Hibah dan Besaran Penerimaan Hibah .....
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor .....Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....;
7. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor ..... Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah;

*(konsideran mengingat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan dibuat)*

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG DAFTAR DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH .....
- KESATU : Daftar Penerima Hibah dan Besaran Penerimaan Hibah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala ..... menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran .....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal .....

BUPATI BANTUL,

Cap. ttd

.....

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala DPPKA Provinsi DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR.....TAHUN.....  
 TENTANG.....

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	NAMA/PENANGGUNGJAWAB	BESARNYA HIBAH	SKPD TEKNIS
1	2	3	4	5	6
	Jumlah keseluruhan			<b>Rp</b>	

BUPATI BANTUL,

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 11 TAHUN 2015  
 TENTANG TATA CARA  
 PENGANGGARAN, PELAKSANAAN  
 DAN PENATAUSAHAAN,  
 PELAPORAN DAN PERTANGGUNG  
 JAWABAN, SERTA MONITORING  
 DAN EVALUASI BELANJA HIBAH  
 CONTOH KEPUTUSAN BUPATI

CONTOH SURAT PENGAJUAN PERMOHONAN

KOP SURAT SKPD TEKNIS

---

Nomor : Bantul,  
 Lamp : .....bendel  
 Hal : Rekomendasi pencairan hibah Kepada :  
 Yth. Bupati Bantul  
 Cq. Kepala DPPKAD  
 di Bantul

Dengan hormat, kami laporkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor :.....Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul TA ..... , Peraturan Bupati Bantul Nomor.....Tahun..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul TA. .... dan Keputusan Bupati Bantul Nomor .....Tahun ..... tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah .....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami telah melakukan evaluasi kelengkapan administrasi maupun rencana penggunaan dana hibah .....telah memenuhi persyaratan untuk dicairkan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami rekomendasikan pencairan hibah .....sebesar Rp.....(terbilang.....), (daftar penerima hibah beserta check-list kelengkapan administrasi terlampir).

Demikian, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih.

Kepala SKPD

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

## DAFTAR PENERIMA HIBAH

NO	NAMA PENERIMA	BESARAN HIBAH (Rp)	NO. REK BANK	KET

Kepala SKPD

.....

NIP

## DAFTAR CHECK - LIST KELENGKAPAN ADMINSTRASI

NO	NAMA PENERIMA	KELENGKAPAN ADMINISTRASI						KET
		SK BUPATI	FC NPHD	PAKTA INTEGRITAS	BUKTI PENGELUAR AN KAS	KWITANSI	FC REK BANK	

Kepala SKPD

.....

NIP

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 11 TAHUN 2015  
 TENTANG TATA CARA  
 PENGANGGARAN, PELAKSANAAN  
 DAN PENATAUSAHAAN,  
 PELAPORAN DAN  
 PERTANGGUNG JAWABAN,  
 SERTA MONITORING DAN  
 EVALUASI BELANJA HIBAH  
 CONTOH KEPUTUSAN BUPATI

**SURAT PERNYATAAN  
 TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
 Jabatan :  
 Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor ..... Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran....., akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan hibah yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul,

Penerima hibah

*Materai*

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN VI :  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 11 TAHUN 2015  
 TENTANG TATA CARA  
 PENGANGGARAN, PELAKSANAAN  
 DAN PENATAUSAHAAN,  
 PELAPORAN DAN  
 PERTANGGUNG JAWABAN,  
 SERTA MONITORING DAN  
 EVALUASI BELANJA HIBAH  
 CONTOH KEPUTUSAN BUPATI

CONTOH BUKTI KAS PENGELURAN

**BUKTI KAS PENGELUARAN**

Terima dari : Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten. Bantul  
 Uang sebesar : Rp.....,- ( ....terbilang.....)

Untuk Pembayaran : Belanja hibah.....  
 .....

**Terbilang : Rp. ....-**

Menyetujui  
 PPKD

Bendahara Pengeluaran

Yang menerima

.....

.....

(Nama Penerima)

NIP. ....

NIP.....

Telah dibukukan :  
 Bk. Tgl.....- No.....  
 BKP. Rek...(sesuaikan APBD)  
 Tahun Anggaran :  
 Paraf,

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 11 TAHUN 2015  
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,  
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
 PELAPORAN DAN PERTANGGUNG  
 JAWABAN, SERTA MONITORING DAN  
 EVALUASI BELANJA HIBAH CONTOH  
 KEPUTUSAN BUPATI

**CONTOH KWITANSI**

**KWITANSI**

Terima dari : Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten. Bantul

Uang sebesar : Rp.....,- ( ....terbilang.....)

Untuk Pembayaran : Belanja hibah.....

.....

**Terbilang : Rp. ....**

,-

Yang menerima

(Nama Penerima)

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 11 TAHUN 2015  
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,  
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
 PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN,  
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI  
 BELANJA HIBAH CONTOH KEPUTUSAN  
 BUPATI

CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA

KOP SURAT SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : ...../.....

**Pada Hari ini ....., tanggal....., bulan....., Tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini :**

1. N a m a : **KEPALA SKPD**  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. N a m a : **PENERIMA HIBAH**  
 Alamat : .....  
 Jabatan : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa .....  
 (.....) Barang yang terdiri dari :

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA	KET.
1					
2					

Selanjutnya pengelolaan dan pemeliharaan perangkat barang tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK KESATU

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI